



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2008** tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Nopember 2008. Dalam upaya mendukung penyelenggaraan *good governance*, BPLHD berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggara negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, dan azas akuntabilitas.

Setiap aparatur pemerintah (birokrasi publik) harus dapat mempertanggung-jawabkan kepada publik dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan tanggungjawab atau lebih dikenal dalam pemerintahan akuntabilitas (*accountability*). Akuntabilitas merupakan salah satu prasyarat penting yang dibutuhkan untuk menjamin kapasitas pemerintah yang legitimate, kredibel, akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan. Sebagai upaya akuntabilitas pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPLHD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan fungsi pokok lembaga pemerintahan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPLHD adalah sebagai berikut:

- Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Dasar Penyusunan LAKIP;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 dengan Kebijakan Nasional.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Visi merupakan tujuan akhir yang akan dicapai oleh suatu organisasi untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Dalam konteks ini, tujuan akhir yang ingin dicapai oleh organisasi BPLHD sebagai perangkat daerah Provinsi Jawa Barat untuk bidang lingkungan hidup adalah mewujudkan lingkungan hidup Jawa Barat yang bisa mendukung terwujudnya visi Jawa

Barat yaitu **“JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**. Penetapan visi BPLHD dilakukan dengan memperhatikan isu lingkungan strategis yang saat ini dihadapi oleh Jawa Barat; visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan Jawa Barat yang dinyatakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018; serta tugas pokok dan fungsi BPLHD sebagai mana telah diuraikan pada Bab 2 dan Bab 3. Visi BPLHD ditetapkan sebagai berikut: **“Menjadi Pelopor dan Pusat Keunggulan Budaya Cinta Lingkungan dalam Mewujudkan Jawa Barat Bestari”**. Bestari merupakan kepanjangan dari Bersih, Sehat, Tangguh, Lestari dan Indah.

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPLHD Daerah Provinsi Jawa Barat, BPLHD Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok yaitu **“menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan”**.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, BPLHD Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kepegawaian daerah meliputi kesekretariatan, tata kelola lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi SDA dan mitigasi bencana serta penatan hukum, kemitraan dan pengembangan kapasitas lingkungan;
3. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTB;
4. Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan
 - 2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018
 - 2.1.2 Rencana Kinerja Tahunan 2015
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja BPLHD Provinsi Jawa Barat

3.1.1 Pengukuran Kinerja

3.1.2 Analisa Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun Sebelumnya

3.1.3 Analisa Perbandingan Pengukuran Kinerja tahun berjalan dengan target kinerja sasaran jangka menengah yang direncanakan

3.1.4 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategik Beserta Solusi

3.1.5 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.6 Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

BAB 4 PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja BPLHD Provinsi Jawa Barat

4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

LAMPIRAN



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pengelolaan lingkungan hidup dimanifestasikan dalam Rencana Strategis BPLHD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, BPLHD Provinsi Jawa Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan bagian dari Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat menjalankan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat berkewajiban menyusun RENSTRA berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)/Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat.

a. Visi dan Misi BPLHD Provinsi Jawa Barat

BPLHD Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016 mengacu kepada Visi Jangka Menengah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu "***Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua***" yang diwujudkan melalui 5 (lima) **Misi** pembangunan yaitu :

1. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing;
2. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan;
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Mengacu kepada visi Jangka Menengah Jawa Barat yaitu "**Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua**", maka Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diberikan urusan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup perlu menetapkan suatu visi organisasinya.

Penetapan visi BPLHD dilakukan dengan memperhatikan isu lingkungan strategis yang saat ini dihadapi oleh Jawa Barat; visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan Jawa Barat yang dinyatakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018; serta tugas pokok dan fungsi BPLHD sebagai mana telah diuraikan pada Bab 2 dan Bab 3. Visi BPLHD ditetapkan sebagai berikut: "**Menjadi Pelopor dan Pusat Keunggulan Budaya Cinta Lingkungan dalam Mewujudkan Jawa Barat Bestari**". Bestari merupakan kepanjangan dari Bersih, Sehat, Tangguh, Lestari dan Indah.

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan misi BPLHD yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Misi, merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, dan dengan tetap memperhatikan isu lingkungan strategis, serta tantangan ke depan, ditetapkan 3 (tiga) misi BPLHD, yaitu:

1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keterkaitan visi dan Misi BPLHD Provinsi Jawa Barat terhadap Misi Provinsi Jawa Barat terutama pada Misi ke-4 yaitu, "**Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan**", yang menjadi acuan untuk melaksanakan kebijakan dan program.

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Ketiga misi itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas Lingkungan;
2. Menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah;
3. Melestarikan ketersediaan Sumber Daya Alam dan fungsi lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kawasan lindung;
5. Meningkatkan kompetensi aparatur bidang lingkungan hidup.

Indikator Kinerja Tujuan :

1. Persentase peningkatan kualitas air sungai;
2. Tingkat polusi udara ambien;
3. Persentase Emisi Gas Rumah Kaca;
4. Jumlah lahan konservasi;
5. Jumlah kebijakan pengelolaan kawasan lindung;
6. Angka pencapaian sasaran kerja pegawai.

Sasaran :

1. Terkendalinya beban pencemaran air sungai utama dan udara perkotaan;
2. Meningkatnya Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
3. Meningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi hutan dan lahan;
4. Meningkatnya penyediaan pranata pengelolaan kawasan lindung;
5. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah di bidang lingkungan.

Kaitan antara Misi BPLHD, Tujuan dan Sasaran Pencapaian Kinerja adalah sebagaimana berikut :

Misi 1 Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator
Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kualitas air sungai	Terkendalinya beban pencemaran air sungai utama dan udara perkotaan	Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang
	Tingkat polutan udara ambien		Indeks Kualitas Udara
Menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah	Persentase peningkatan kualitas air sungai	Meningkatnya Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
			Jumlah lokasi Program kampung Iklim (PROKLIM)

Misi 2 Mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator
Melestarikan ketersediaan Sumber Daya Alam dan fungsi lingkungan hidup	Jumlah lahan konservasi	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati
Meningkatkan kualitas kawasan lindung	Jumlah kebijakan pengelolaan kawasan lindung	Meningkatnya penyediaan pranata pengelolaan kawasan lindung	Jumlah pedoman pengelolaan kawasan lindung dan non lindung dalam pelaksanaan pembangunan

Misi 3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator
Meningkatkan kompetensi aparatur bidang lingkungan hidup	Angka pencapaian sasaran kerja pegawai	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah di bidang lingkungan	Tingkat capaian target kinerja

c. Kebijakan dan Program

Uraian kebijakan dan program adalah sebagai berikut :

Kebijakan 1 :

Pemantauan kualitas air sungai dan waduk

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 2 :

Mengidentifikasi dan mengendalikan sumber-sumber pencemar air sungai dan waduk

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 3 :

Pembuatan kebijakan pengelolaan lingkungan

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 4 :

Koordinasi lintas sektor dan masyarakat terkait pengelolaan sungai dan mutu udara

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 5 :

Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pelaku usaha dan/atau kegiatan

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 6 :

Pemantauan kualitas udara ambien

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 7 :

Mengidentifikasi sumber-sumber pencemar udara

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 8 :

Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian pelajar dalam pengelolaan lingkungan

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 9 :

Kemitraan dengan kelompok masyarakat

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 10 :

Penggunaan media sebagai alat kampanye lingkungan

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 11 :

Menyebarkan teknologi ramah lingkungan

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 12 :

Meningkatkan akses publik pada lembaga pengelola lingkungan

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 13 :

Menguatkan peran satgas lingkungan dalam penegakkan hukum lingkungan

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 14 :

Meningkatkan peran PPNS dan PPLH dalam pengawasan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 15 :

Pengawasan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 16 :

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 17 :

Menyebarkan informasi lingkungan hidup yang mudah diakses oleh masyarakat

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 18 :

Menyusun data lingkungan secara periodik

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Kebijakan 19 :

Aktif terlibat dalam kelompok kerja mitigasi GRK tingkat provinsi

Program :

Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kebijakan 20 :

Mengidentifikasi dan mempertahankan keberlanjutan perilaku tangguh iklim

Program :

Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kebijakan 21 :

Percontohan pengembangan masyarakat adaptif perubahan iklim

Program :

Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kebijakan 22 :

Koordinasi lintas sektor dan masyarakat terkait rehabilitasi lahan kritis dan konservasi hutan dan lahan

Program :

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kebijakan 23 :

Pembinaan desa berbudaya lingkungan

Program :

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kebijakan 24 :

Penerapan Imbal Jasa Lingkungan

Program :

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kebijakan 25 :

Menyusun pranata pengelolaan kawasan lindung

Program :

Program Pengelolaan Kawasan Lindung

Kebijakan 26 :

Peningkatan kerja sama dengan universitas dalam dan luar negeri serta badan-badan di klat se-Indonesia.

Program :

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

2.1.2 Rencana Kinerja Tahunan 2016

Perencanaan Kinerja BPLHD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 sebagai upaya pelaksanaan TUPOKSI dan kebijakan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2015 pada Misi ke 4 yaitu, “Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan”

Adapun Rencana Kinerja Tahunan BPLHD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan
BPLHD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		
		Uraian	Satuan	Target
1.	Terkendalinya beban pencemaran air sungai utama dan udara perkotaan	Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang	%	42,5
		Indeks Kualitas Udara	-	60
2.	Meningkatnya Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	5-6
		Jumlah lokasi Program kampung iklim (PROKLIM)	kampung	61
3.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati	taman	1
4.	Meningkatnya penyediaan pranata pengelolaan kawasan lindung	Jumlah pedoman pengelolaan kawasan lindung dan non lindung dalam pelaksanaan pembangunan	aturan	4

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, dimana Rencana kinerja yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir tahun anggaran 2016. Adapun Perjanjian Kinerja BPLHD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
BPLHD Provinsi Jawa Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terkendalinya beban pencemaran air sungai utama dan udara perkotaan	Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang	42,5
		Indeks kualitas udara	60
2.	Meningkatnya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah lokasi Program kampung Iklim (PROKLIM)	61 kampung
		Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	5-6 %
3.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1 taman
4.	Meningkatnya penyediaan pranata pengelolaan kawasan lindung	Jumlah pedoman pengelolaan kawasan lindung dan non lindung dalam pelaksanaan pembangunan	4 aturan

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 42.085.425.000	APBD
Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp 1.157.655.000	APBD
Program Pengelolaan Kawasan Lindung	Rp 250.000.000	APBD
Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp 8.468.000.000	APBD

Pogram Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup

Rp 1.700.000.000

APBN

Adapun Sasaran Stratejik dan Indikator Rencana Strategis yang terakomodir dalam program dan kegiatan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Pada Misi 1, yaitu Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdapat 2 sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

SASARAN		Indikator	TARGET CAPAIAN	KET
Uraian				
Terkendalinya beban pencemaran air sungai utama dan udara perkotaan		Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang	42,5%	
		Indeks Kualitas Udara	60	
Menurunkan emisi gas rumah kaca		Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	5-6 %	
		Jumlah lokasi Program kampung Iklim (PROKLIM)	61 kampung	

Pada Misi 2, yaitu Mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam terdapat 2 sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

SASARAN		Indikator	TARGET CAPAIAN	KET
Uraian				
Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati		Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati	1 taman	
Meningkatnya penyediaan pranata pengelolaan kawasan lindung		Jumlah pedoman pengelolaan kawasan lindung dan non lindung dalam pelaksanaan pembangunan	4 aturan	

Pada Misi 3, yaitu Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat 1 sasaran yang ingin dicapai tapi tidak masuk ke dalam **PK eselon II** melainkan masuk kepada **PK Eselon III**.



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja BPLHD Provinsi Jawa Barat

Dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan dalam hal ini tahun 2016, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Disamping itu dimuat pula keterangan yang menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau sektor lain. Untuk itu, perlu dilakukan pembuatan kerangka pengukuran kinerja dengan terlebih dahulu dilakukan penyusunan Rencana Strategik (RS) yang menjabarkan setiap misi yang tertuang dalam RENSTRA Instansi tentang uraian tujuan, uraian dan indikator sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program. Setelah RS tersusun, selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). RKT merupakan penjabaran dari setiap program yang tertuang dalam RS dalam bentuk uraian kegiatan berikut indikator kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian dalam satu tahun pelaksanaan. Untuk mengetahui sejauh mana besarnya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Pengukuran kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan yang meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan laporannya digunakan metode perbandingan yaitu membandingkan target kinerja berdasarkan sasaran strategik dan indikator sasarannya yang berfungsi sebagai alat ukur kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerjadengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan sehingga menghasilkan prosentase capaian kinerja. Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan prosentase capaianrencana adalah sebagai berikut :

$$\text{Prosentase pencapaian rencana} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan prosentase capaian kinerja yang dihasilkan dari metode perbandingan tersebut, selanjutnya dilakukan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja instansi. Berdasarkan analisis

tersebut maka dapat dilihat pencapaian akuntabilitas kinerja sebuah instansi berdasarkan prosentase capaian, dengan indikator capaian antara lain :

- a. Prosentase capaian > 100 %, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan sangat baik.
- b. Prosentase capaian 80- 100 %, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan baik.
- c. Prosentase capaian 60-80 %, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan cukup baik.
- d. Prosentase capaian 40-60 %, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan kurang baik.
- e. Prosentase capaian <40 %, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan buruk

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dapat dilihat berdasarkan persentase tingkat capaian, yang menunjukkan besar sasaran kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2016 sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang terukur dari nilai persentase tingkat capaian. Selain itu, terdapat pengukuran untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama BPLHD Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama
BPLHD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA TAHUN 2016	REALISASI	PENCAPAIAN	KET
1	Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang	42,5 %	56,12 %	132,05 %	IKU GUBERNUR
2	Indeks Kualitas Udara	60	66,24	110,40 %	
3	Jumlah lokasi Program kampung Iklim (PROKLIM)	61	61	100%	
4	Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	5-6%	11,45%	190,83%	IKU GUBERNUR
5	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1	6	600%	
6	Jumlah pedoman	4	4	100%	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA TAHUN 2016	REALISASI	PENCAPAIAN	KET
	pengelolaan kawasan lindung dan non lindung dalam pelaksanaan pembangunan				

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama BPLHD yang mendukung indikator kinerja utama Gubernur Jawa Barat, yaitu Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang. Pencapaian kinerja indikator tersebut sangat baik karena telah sesuai atau mencapai capain kinerja 132,05%.

Adapun pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja BPLHD Provinsi Jawa Barat di Tahun 2016 untuk setiap misi secara rinci dapat dilihat sebagaimana berikut :

1. Pada Misi 1, yaitu meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdapat 4 sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

SASARAN		TINGKAT CAPAIAN		Persentase Capaian	Ket
Uraian	Indikator	Target 2016	Realisasi		
Terkendalinya beban pencemaran air sungai utama dan udara perkotaan	Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang	42,5%	56,12 %	132,5%	IKU GUBERNUR
	Indeks Kualitas Udara	60	66,24	110,40%	
Meningkatnya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah lokasi Program kampung Iklim (PROKLIM)	61	61	100%	IKU GUBERNUR
	Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	5-6%	11,45%	190,83%	

2. Pada Misi 2, yaitu Mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam terdapat 2 sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

SASARAN		TINGKAT CAPAIAN		Persentase Capaian	Ket
Uraian	Indikator	Target 2016	Realisasi		
Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1	6	600%	

SASARAN		TINGKAT CAPAIAN		Persentase Capaian	Ket
Uraian	Indikator	Target 2016	Realisasi		
Meningkatnya penyediaan pranata pengelolaan kawasan lindung	Jumlah pedoman pengelolaan kawasan lindung dan non lindung dalam pelaksanaan pembangunan	4	4	100%	

Adapun analisis hasil pengukuran kinerja sasaran strategik serta perbandingan antara hasil pengukuran kinerja sasaran strategik terhadap target capaian IKU pada tahun 2015 maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

A. Pada Misi 1 terdapat 4 sasaran strategik dan indikator capaiannya antara lain :

- a. Sasaran strategik Terkendalinya beban pencemaran air sungai utama dan udara perkotaan dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 1. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang dengan target capaian 42,5% yang merupakan **Indikator Kinerja Utama**, realisasi target capaian yaitu 56,12 % dengan prosentase capaian sebesar 132,5% sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **sangat baik**.
 2. Indeks Kualitas Udara dengan target capaian 60 yang merupakan **Indikator Kinerja Utama**, realisasi target capaian yaitu 66,24 dengan prosentase capaian sebesar 110,40% sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **sangat baik**.
- b. Sasaran strategik Meningkatkan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :
 1. Jumlah lokasi Program kampung Iklim (PROKLIM) dengan target capaian 61 yang merupakan **Indikator Kinerja Utama**, realisasi target capaian yaitu 61 dengan prosentase capaian sebesar 100 % sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **sangat baik**.
 2. Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan target capaian 5-6% yang merupakan **Indikator Kinerja Utama**, realisasi target capaian yaitu 11,45% dengan prosentase capaian sebesar 190,83 % sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **sangat baik**.

B. Pada Misi 2 terdapat 2 sasaran strategik dan indikator capaiannya antara lain :

- a. Sasaran strategik Meningkatkan penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi hutan dan lahan, dengan indikator kinerja sasaran Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan target capaian 1 yang merupakan **Indikator Kinerja Utama**, realisasi target capaian yaitu 6 dengan prosentase capaian sebesar 600 % sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **sangat baik**.
- b. Sasaran strategik Meningkatkan penyediaan pranata pengelolaan kawasan lindung, dengan indikator kinerja sasaran Jumlah pedoman pengelolaan kawasan lindung dan

non lindung dalam pelaksanaan pembangunan dengan target capaian 4 yang merupakan **Indikator Kinerja Utama**, realisasi target capaian yaitu 4 dengan prosentase capaian sebesar 100 % sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **sangat baik**.

- C. Pada Misi 3 merupakan sasaran stratejik dan indikator kinerja dengan program dan kegiatan *fixed cost* yang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat.

3.1.2 Analisa Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun Sebelumnya

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat grafik peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Adapun perbandingan pengukuran kinerja pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tabel Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2015 dan 2016
BPLHD Provinsi Jawa Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2015			2016			Target Renstra Tahun 2018	Percepatan/Perlambatan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Prosentase Capaian		
1.	Terkendalinya Beban Pencemaran Air Sungai Utama Dan Udara Perkotaan	Pencapaian Status Mutu Sungai Utama Dan Waduk Besar Dengan Tingkat Cemar Sedang	39%	93,54%	239,8%	42,5 %	56,12 %	132,05 %	48.82%	Percepatan
		Indeks Kualitas Udara	58	58	100%	60	66,24	110,40%	66	-
2.	Meningkatnya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah lokasi Program kampung Iklim (PROKLIM)	14	23	164,28%	61	61	100%	70	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2015			2016			Target Renstra Tahun 2018	Percepatan/Perlambatan
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Prosentase Capaian		
		Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	3 %	3,19 %	106,33%	5-6%	11,45%	190,83%	7-8%	Percepatan
3.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1	1	100%	1	6	600%	1	Percepatan
4.	Meningkatnya penyediaan pranata pengelolaan kawasan lindung	Jumlah pedoman pengelolaan kawasan lindung dan non lindung dalam pelaksanaan pembangunan	2	2	100%	4	4	100%	7	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa indikator sasaran yang mengalami percepatan pencapaian kinerja, adapun indikator sasaran dengan status percepatan pada tahun 2016 yaitu :

1. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama Dan Waduk Besar Dengan Tingkat Cemar Sedang dengan capaian 132,05 %, ini dikarenakan jumlah sungai dan waduk yang dipantau bertambah menjadi 11 Sungai dan 1 Waduk dengan metode analisis pengukuran data yang berbeda
2. Pencapaian Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan capaian 190,83%, ini dikarenakan sudah mulai terjadinya sinergisitas program dan kegiatan di semua sektor dalam upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Jawa Barat.
3. Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati dengan capaian 600%, ini disebabkan bertambahnya jumlah taman kehati yang dibangun dan dibina di Jawa Barat termasuk taman kehati milik kota/kabupaten dan swasta.

Indikator Sasaran yang sesuai target pada tahun 2016 yaitu :

1. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama Dan Waduk Besar Dengan Tingkat Cemar Sedang;
2. Indeks Kualitas Udara ;
3. Jumlah lokasi Program kampung iklim (PROKLIM);
4. Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
5. Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
6. Jumlah pedoman pengelolaan kawasan lindung dan non lindung dalam pelaksanaan pembangunan.

1.1.3 Analisa Perbandingan Pengukuran Kinerja tahun berjalan dengan target kinerja sasaran jangka menengah yang direncanakan

Pencapaian Indikator kinerja tahun 2016 dengan target kinerja sasaran jangka menengah yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018, mengacu pada misi ke empat RPJMD tahun 2013-2018 yaitu Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan, melalui pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
3. Program Kawasan Lindung
4. Program Rehabilitas dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Adapun Pencapaian kinerja tahun 2016 dengan target kinerja sasaran RPJMD tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Berjalan Terhadap Target RPJMD Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi		Realisasi S/D Tahun 2016	Target RPJMD 2016	% Capaian Kinerja Tahun 2016 Terhadap RPJMD 2016
			2015	2016			
1.	Terkendalinya Beban Pencemaran Air Sungai Utama Dan Udara Perkotaan	Pencapaian Status Mutu Sungai Utama Dan Waduk Besar Dengan Tingkat Cemar Sedang	93,54%	56,12 %	56,12 %	11.2-11.7%	479.66%
		Indeks Kualitas Udara	58	60	60	-	-
2.	Meningkatnya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah lokasi Program kampung Iklim (PROKLIM)	23	61	61	-	-
		Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	3,19 %	11,45%	11,45%	5-6%	190.83%
3.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1	6	6	-	-
4.	Meningkatnya penyediaan pranata pengelolaan kawasan lindung	Jumlah pedoman pengelolaan kawasan lindung dan non lindung dalam pelaksanaan pembangunan	2	4	4	-	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 2 indikator kinerja sasaran pada BPLHD Provinsi Jawa Barat yang mendukung Indikator kinerja strategis RPJMD yang merupakan **Indikator Utama Gubernur Jawa Barat** yaitu Pencapaian Status Mutu Sungai Utama Dan Waduk Besar Dengan Tingkat Cemar Sedang, dan Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Pada tahun 2016, untuk indikator kinerja Pencapaian Status Mutu Sungai Utama Dan Waduk Besar Dengan Tingkat Cemar Sedang dengan target RPJMD 11,2-11.7%, realisasi target capaian yaitu 56,12 % dengan prosentase capaian sebesar >100% sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **sangat baik**, hal ini disebabkan bertambahnya jumlah sungai yang dipantau dengan kondisi lingkungan yang mulai membaik, namun realisasi target capaian pada tahun 2016 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2015 hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 mengalami musim kemarau basah, yang mana curah hujannya sangat tinggi sehingga berpengaruh terhadap konsentrasi pencemar di dalam air yang mengalami pengenceran sehingga kualitas air sungai menjadi lebih baik. Pada indikator kinerja sasaran Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), prosentase realisasi capaian >100 %, hal dikarenakan sudah semakin tingginya sinergitas program dan kegiatan dari semua sektor terkait dalam upaya menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Jawa Barat yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat.

1.1.4 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategik Beserta Solusi

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja secara umum sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 seluruh **sasaran strategik melebihi target capaian yaitu capaian sangat baik**, antara lain :

1. Sasaran strategik “Terkendalinya beban pencemaran air sungai utama dan udara perkotaan dengan indikator kinerja sasaran” yaitu:
 - a. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang dengan target capaian 42,5% yang merupakan **Indikator Kinerja Utama**, realisasi target capaian yaitu 56,12 % dengan prosentase capaian sebesar >100% sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **sangat baik**. keberhasilan pencapaian indikator kinerja dengan sangat baik ini karena bertambahnya jumlah sungai yang dipantau dengan kondisi lingkungan yang mulai membaik. Kondisi lingkungan yang mulai membaik didukung juga oleh beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPLHD melalui kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui eco village/desa berbudaya lingkungan, penanganan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan tindak lanjut pengaduan kasus lingkungan, pembinaan industri melalui Properda, serta pemantuan kualitas air, dan lainnya.
 - b. Indeks Kualitas Udara dengan target capaian 60 yang **merupakan Indikator Kinerja Utama**, realisasi target capaian yaitu 66,24 dengan prosentase capaian sebesar >100% sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **sangat baik**. keberhasilan pencapaian indikator kinerja dengan sangat baik ini karena terbinaanya usaha dan/atau kegiatan yang memiliki sumber misi tidak bergerak untuk memenuhi baku mutu emisi

sesuai peraturan yang telah ditetapkan melalui kegiatan Properda, adanya intervensi persyaratan teknis cerobong dan baku mutu yang spesifik bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan sesuai aturan dalam penyusunan AMDAL yang harus ditaati oleh kegiatan dan/atau usaha yang akan berdiri sehingga dapat mengurangi tingkat emisi yang dihasilkan, penanganan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan tindak lanjut pengaduan kasus lingkungan, serta pemantuan kualitas udara, dan lainnya.

2. Sasaran stratejik “meningkatnya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim” dengan indikator kinerja sasaran yaitu :

- a. Jumlah lokasi Program kampung Iklim (PROKLIM) yang merupakan **Indikator Kinerja Utama**, dengan target capaian 61 kampung iklim, realisasi target capaian yaitu 61 kampung iklim dengan prosentase capaian sebesar 100 % sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **sangat baik**. Target capaian pada indikator kinerja ini merupakan akumulasi pencapaian dari tahun-tahun sebelumnya.
- b. Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan target capaian 5-6 % yang merupakan **Indikator Kinerja Utama**, realisasi target capaian yaitu 11.45% dengan prosentase capaian >100 % sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **sangat baik**. Target capaian pada indikator kinerja ini merupakan akumulasi pencapaian penurunan emisi dari tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan pencapaian kedua indikator kinerja ini dengan sangat baik disebabkan semakin tinggi dukungan beberapa sektor untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan adanya sinergitas program dan kegiatan dari semua sektor terkait dalam upaya menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Jawa Barat seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat. Selain itu, semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim melalui yang sedang terjadi saat ini sehingga mulai menerapkan hidup yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim yang terjadi.

3. Sasaran stratejik “meningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi hutan dan lahan” dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan target capaian 1 taman KEHATI yang merupakan Indikator Kinerja Utama, realisasi target capaian yaitu 6 taman KEHATI dengan prosentase capaian > 100 % sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah taman KEHATI yang dibangun dan dibina di Jawa Barat termasuk di dalamnya taman kehati milik kota/kabupaten dan pihak swasta.

4. Sasaran stratejik “meningkatnya penyediaan pranata pengelolaan kawasan lindung” dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Jumlah pedoman pengelolaan kawasan lindung dan non lindung dalam pelaksanaan pembangunan dengan target capaian 4 yang merupakan **Indikator Kinerja Utama**, realisasi target capaian yaitu 4 dengan prosentase capaian sebesar 100 % sehingga

pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **sangat baik**. Hal ini dikarenakan telah dimilikinya payung hukum dalam pengelolaan kawasan lindung yang disusun oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung, sehingga pranata yang dibuat dapat direncanakan sesuai payung hukum tersebut.

1.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya BPLHD Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja (%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Terkendalinya Beban Pencemaran Air Sungai Utama Dan Udara Perkotaan	Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang	132,05	88,05	11,95
		Indeks Kualitas Udara	110,4		
2	Meningkatnya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah lokasi Program kampung Iklim (PROKLIM)	100	98,89	1,11
		Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor limbah	190,83		
3	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	600	94,31	5,69
4.	Meningkatnya penyediaan pranata pengelolaan kawasan lindung	Jumlah pedoman pengelolaan kawasan lindung dan non lindung dalam pelaksanaan pembangunan	100	79,64	20,36

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh sasaran strategis menyumbang efisiensi sumber daya di tahun 2016. Adapun tingkat efisiensi tertinggi ditunjukkan oleh pencapaian sasaran strategis Meningkatnya penyediaan prana pengelolaan kawasan lindung dengan tingkat efisiensi 20,36%, dengan prosentasi capaian kinerja >100%. Sedangkan tingkat efisiensi terendah ditunjukkan oleh pencapaian sasaran strategis Meningkatnya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan tingkat efisiensi 1,11%, dengan prosentase capaian kinerja 100%. Efisiensi sumberdaya merupakan hasil dari efisiensi sisa lelang, penunjukan langsung, pengadaan langsung barang dan jasa.

1.1.6 Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan anggaran BPLHD pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 70.421.275.900,- meliputi pos Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Gaji dan Tunjangan Penghasilan PNS sebesar Rp. 11.439.995.900,- serta pos Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 58.981.280.000,-. Pada pos anggaran Belanja Langsung meliputi 11 (sebelas) program daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 42 kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan tahun 2016 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran strategik dan indikatornya yang tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2016, berikut program dan kegiatan tahun 2016 yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian perjanjian kinerja:

- a) Sasaran Terkendalinya beban pencemaran air sungai utama dan udara perkotaan terdapat dalam PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pembinaan Teknis AMDAL di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dengan target Terasfasilitasinya sidang KPA Prov Jabar sebanyak 11 dokumen LH, Terpantaunya Implementasi dokumen LH sebanyak 10 dokumen lingkungan yang disetujui, Terbinanya Teknis Amdal Kab/Kota se-Jawa Barat sebanyak 12 KPA dan 8 LPJP, dan Terintegrasinya sistem informasi Amdal dalam SIL.
 2. Kegiatan Penyusunan DED Pusat Keunggulan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 659.200.000,- dengan target Tersedianya DED dan AMDAL Pusat Keunggulan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 laporan.
 3. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Produksi Bersih dan Teknologi Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dengan target Tersosialisasi Produksi Bersih sebanyak 1 kegiatan, Terlaksananya Bintek Produksi Bersih kepada 60 UKM, Workshop Teknologi Lingkungan sebanyak 1 kegiatan, dan Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Kebijakan Ekonomi / Teknologi Lingkungan 1 Kegiatan;
 4. Kegiatan METR Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Metropolitan Jawa Barat (3 Metropolitan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.744.776.000,- dengan target Terlaksananya koordinasi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Metropolitan Jawa Barat sebanyak 1 kegiatan dan Tersusunnya laporan

- Kajian Lingkungan Hidup Strategis Metropolitan Jawa Barat sebanyak 3 Dokumen KLHS;
5. Kegiatan PPP Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pusat Pertumbuhan Jawa Barat (3 pusat Pertumbuhan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.170.232.000,- dengan target Terlaksananya Koordinasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pusat Pertumbuhan Jawa Barat (Rancabuaya, Pelabuhan Ratu dan Pangandaran) sebanyak 1 kegiatan dan "Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pusat Pertumbuhan Jawa Barat (Rancabuaya, Pelabuhan Ratu dan Pangandaran) sebanyak 3 Dokumen KLHS;
 6. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi KLHS di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dengan target Terlaksananya Pembinaan dalam Penyusunan KLHS, Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan KLHS terhadap 19 Kabupaten dan 8 Kota, dan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pembinaan dan Koordinasi KLHS sebanyak 1 kegiatan;
 7. Kegiatan Pemantauan Pencemaran Air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.541.376.000,- dengan target Terpantaunya kualitas air sungai di 7 DAS (DAS Cileungsi/Bekasi, Cilamaya, Cimanuk, Cipunagara, Ciwaringin, Cilaki, Cibuni) dan 1 Waduk Darma, Terlaksananya kajian perhitungan daya tampung beban pencemaran sungai di DAS Cipunagara, Ciwaringin, Cilaki dan Cibuni, Terlaksananya rapat koordinasi bidang pengendalian pencemaran, Terlaksananya penyusunan naskah akademik/rancangan baku mutu air limbah dan pedoman pemanfaatan air limbah, Terlaksananya kajian daya tampung beban pencemaran Sub DAS Cikapundung, Terlaksananya penyusunan mekanisme pengendalian pencemaran air Kab/Kota se Jawa Barat, Terpantaunya dan terevaluasinya implementasi program PPSP di Jawa Barat, Terlaksananya penyusunan Master Plan Pemantauan Kualitas Air Sungai Utama di Jawa Barat Secara Kontinyu , Terlaksananya penyusunan DED Teknologi Pengolahan Air Limbah Industri Tahu Tempe di DAS Cilamaya, dan Terlaksananya kajian daya dukung dan daya tampung Sub DAS Citarik;
 8. Kegiatan Pemantauan Pencemaran Udara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.329.532.000,- dengan target Tersedianya Alat Pemantauan Kualitas Udara di Jawa Barat Melalui Metode Passive Sampler, Tersedia Alat Fix Station 2 Unit, Terkoordinasikannya pengendalian pencemaran udara di kab/kota, Terinventarisirnya sumber emisi di Jawa Barat, dan Terlaksananya Bintek Inventarisasi Sumber Emisi, Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara;
 9. Kegiatan Pemantauan Pencemaran Air Berbasis Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 810.000.000,- dengan target Terlaksananya pemantauan pencemaran sungai berbasis masyarakat melalui patroli sungai di 4 segmen sungai Citarum Hulu di Kab. Bandung dan Tersusunnya strategi dan mekanisme patroli sungai sebanyak 1 dokumen strategi dan mekanisme patroli sungai;
 10. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Limbah Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 272.765.000,- dengan target Tersusunnya Naskah Akademis dan Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Air Limbah sebanyak 2 Dokumen;

11. Kegiatan GCB - Pembinaan Industri Melalui PROPERDA di DAS Citarum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.979.750.000,- dengan target Terbinanya industri melalui properda dalam mendukung GCB sebanyak 200 (Dua ratus) industri di 7 Kab/Kota, Peningkatan kapasitas SDM pelaksanaan Bimtek PROPERDA sebanyak 32 orang, dan Perancangan Sistem Berbasis Web Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
12. Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pengelola lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 580.000.000,- dengan target Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pengawas Lingkungan Hidup kab/kota di Jawa Barat sebanyak 40 orang SDM Pengelola lingkungan di industri, dan Terfasilitasinya SDM Labling sebanyak 40 orang SDM Aparatur Pengawas Lingkungan;
13. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dengan target Peningkatan kapasitas SDM pengelola limbah B3 di industri 40 SDM pengelola limbah B3 di Industri, Verifikasi perizinan Pengelolaan Limbah B3, Tersosialisasinya pengelolaan limbah B3 berdasarkan PP 101 Tahun 2014 kepada 350 usaha dan/atau kegiatan, dan Tersusunnya mekanisme pelaporan B3;
14. Kegiatan GCB - Penanganan Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan target Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Diluar Pengadilan (ADR dan Sanksi Administratif) sebanyak 55 Sanksi administratif, 1 penyelesaian ADR, Terlaksananya Pengawasan Ketaatan Industri Terhadap Sanksi sebanyak 100 industri, Terlaksananya Verifikasi pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebanyak 70 pengaduan, Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang LH sebanyak 175 orang aparat LH, aparat penegak hukum, dan dunia usaha, Terlaksananya Sosialisasi Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Jabar sebanyak 175 orang aparat LH dan aparat penegak hukum, dan Terlaksananya Cetak Buku Peraturan Perundangan Bidang Lingkungan Hidup sebanyak 1 paket;
15. Kegiatan Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan target Terpenuhinya Operasional Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Jawa Barat sebanyak 150 orang anggota, Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pengadilan sebanyak 3 kasus pidana, Terlaksananya Pemasangan portal pada lokasi penambangan ilegal sebanyak 10 portal, dan Terlaksananya Cetak Buku Peraturan Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebanyak 1 paket;
16. Kegiatan CLTH KKP Pengendalian Pencemaran Kegiatan Pertambangan di Kec. Ciemas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dengan target Terlaksananya Pengendalian Pencemaran Kegiatan Pertambangan di Kec. Ciemas sebanyak 10 penambang liar;
17. Kegiatan Pembinaan Teknis Adiwiyata dan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dengan target Terlaksananya Workshop Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Guru sebanyak 100 orang dan Terlaksananya Pembinaan Program SBL dan Adiwiyata sebanyak 100 orang;

18. Kegiatan Pembinaan Teknis Program Adipura, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dengan target Terlaksananya Workshop Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Guru sebanyak 100 orang dan Terlaksananya Pembinaan Program SBL dan Adiwiyata sebanyak 100 orang;
19. Kegiatan GCB - Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.284.200.000,- dengan target Terlaksananya Bintek Bank Sampah sebanyak 1(satu) kali @ 100 Orang dan Terlaksananya Bintek Kompos Organik sebanyak 1(satu) kali @ 100 Orang;
20. Kegiatan GCB - Peningkatan Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- dengan target Terlaksananya Peringatan earth hour sebanyak 1(satu) kali @ 1000 Orang, Terlaksananya Peringatan hari Lingkungan Hidup sebanyak 1(satu) kali @ 1000 Orang, Terlaksananya Penghargaan Raksaprasada sebanyak 250 Penghargaan, dan Terlaksananya Kampanye dengan media massa sebanyak 2 paket;
21. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-, dengan target Terlaksananya pengembangan SIL sebanyak 1 database, 1 Portal, Terlaksananya koordinasi kegiatan penyusunan basis data Jawa Barat dan pengembangan SIL terhadap 27 kab/kota, dan Tersusunnya warta lingkungan hidup jawa barat per 6 bulan sebanyak 100 Buku;
22. Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-, dan target kegiatan ada,ah Tersedianya Buku SLHD Jawa Barat Tahun 2015 sebanyak 140 buku, Tersedianya Buku ASER Tahun 2015 sebanyak 150 buku, Tersusunnya SLHD Jawa Barat Tahun 2015 sebanyak 2 dokumen, Terlaksananya koordinasi kegiatan penyusunan SLHD Jawa Barat terhadap 27 Kabupaten/Kota, dan Terlaksananya Penilaian SLHD Kab/Kota tahun 2015 terhadap 27 Kabupaten/Kota;
23. Kegiatan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Lingkungan Hidup Tahun 2016, dengan alokasi anggaran Rp. 280.000.000,-, dengan target kegiatan Tersedianya Dokumen Pelaksanaan NSPK Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 sebanyak 1 dokumen, Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan NSPK Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 sebanyak 2 kali, dan Terlaksananya sosialisasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan NSPK Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 terhadap 27 Kabupaten/Kota;
24. Kegiatan Implementasi Kantor Berbudaya Lingkungan (Green Building), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 322.000.000,-, dengan target kegiatan adalah Terlaksananya Penilaian Kantor Berbudaya Lingkungan sebanyak 150 dan BLH Kabupaten/kota se-jawa barat, Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Penilaian Kantor Berbudaya Lingkungan sebanyak 3 kali, Terlaksananya Penyusunan Pedoman Kantor Berbudaya Lingkungan sebanyak 1 paket, Terlaksananya Pembuatan Animasi Kantor Berbudaya Lingkungan sebanyak 1 paket, dan Terlaksananya Pengumuman Pemenang Kantor Berbudaya Lingkungan sebanyak 1 paket;
25. Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Gerakan Citarum Bestari di Berbagai Media, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-, dengan target kegiatan adalah

- Terlaksananya Sosialisasi dan Kampanye Gerakan Citarum Bestari di berbagai Media di 3 media, Tersusunnya Bahan Materi Kampanye di Media Cetak sebanyak 1 paket, dan Terlaksananya Kampanye Gerakan Citarum Bestari Kepada Masyarakat sebanyak 12 bulan;
26. Kegiatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.776.056.000,-, dengan target kegiatan adalah Terlaksananya Sosialisasi dan Kampanye Gerakan Citarum Bestari di berbagai Media di 3 media, Tersusunnya Bahan Materi Kampanye di Media Cetak sebanyak 1 paket, dan Terlaksananya Kampanye Gerakan Citarum Tersedianya Mobil laboratorium lingkungan 1 unit, Tersedianya Bak Sampah Motor (BAKTOR) 40 unit, Tersedianya Rumah dan Peralatan Pengkomposan 20 unit, dan Tersedianya IPAL Komunal Domestik 1 unit;
 27. Kegiatan Kegiatan Penanggulangan Bencana Lingkungan DAS Citarum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.328.700.000,-, dengan target kegiatan adalah Terlaksananya Gerakan Gotong Royong di DAS Citarum Hulu, 175 Desa sebanyak 32 kali dan Terlaksananya kampanye lingkungan di DAS Citarum Hulu, 9 Lokasi sebanyak 1 kali.
- b) Sasaran Meningkatnya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terdapat dalam PROGRAM MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM, dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Pengembangan Model Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Jawa Barat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 272.755.000,-, dengan target kegiatan adalah Tersosialisasikannya model adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim untuk 70 orang dan Tersusunnya DED permodelan sistem ketahanan air sebagai dampak dari adanya perubahan iklim dan 4 (empat) unit percontohnya;
 2. Kegiatan Penyusunan SOP Peringatan Dini Bencana Perubahan Iklim, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 484.900.000,-, dengan target kegiatan adalah Tersusunnya SOP peringatan dini bencana perubahan iklim di Lokasi rawan Banjir di Kab. Bandung memiliki 1 dokumen SOP, 1 forum pemantauan bencana, 1 peta wilayah banjir dan longsor, 1 unit perangkat sarana peringatan dini;
 3. Kegiatan Koordinasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-, dengan target kegiatan adalah Terlaksananya koordinasi pelaksanaan inventarisasi GRK se-Jawa Barat, Terlaksananya sinergitas pelaksanaan adaptasi terhadap perubahan iklim se-Jawa Barat, dan Tersosialisasikannya pelaksanaan program perubahan iklim se-Jawa Barat;
 4. Kegiatan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, dengan target kegiatan adalah "Tersusunnya Laporan PEP 2016 sektor limbah, Laporan Penyelenggaraan inventarisasi GRK Jawa Barat 2016 dan Laporan ujicoba MRV PEP RAD GRK 2014-2015.

- c) Sasaran Meningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi hutan dan lahan terdapat dalam PROGRAM REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP dengan Kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.431.000.000,-, dengan target Tersusunnya Updating Status Persebaran Keanekaragaman Flora dan Fauna Jawa Barat sebanyak 1 (satu) Dokumen, Terlaksananya Workshop Updating Status Persebaran Keanekaragaman Flora dan Fauna Jawa Barat sebanyak 1(satu) Kali, sebanyak 50 orang, 1 (satu) Proceeding, Terlaksananya Workshop Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jawa Barat sebanyak 1 (satu) Kali, sebanyak 50 orang, 1 (satu) Proceeding, Terbangunnya Landmark Taman Kehati sebanyak 1 unit di Taman Kehati Jatinangor;
 2. Kegiatan GCB-Pengembangan Eco Village (Desa berbudaya Lingkungan) di DAS Citarum Hulu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.943.000.000,-, dan target kegiatan adalah Terlaksananya bimbingan teknis Calon fasilitator dan Calon Pendamping Lokal di Citarum Hulu (20-60 KM) Sebanyak 100 orang, 30 orang Fasilitator dan 70 orang Pendamping lokal, Terlaksananya Pendampingan lanjutan di 120 Desa DAS Citarum Hulu 0-40 Km Sebanyak 10 kali, Terlaksananya Riungan dan pendampingan Ecovillage di Citarum Hulu (20-60 KM) Sebanyak 8 Kali riungan dan 5 kali pendampingan di 55 desa (7 Kecamatan Kab. Bandung dan 2 Kec. Kab. Bandung Barat), Terlaksananya koordinasi/sinergitas dan evaluasi pendampingan Ecovillage di Citarum Hulu (0-60 KM) sebanyak 1 Dokumen, Terlaksananya Penilaian lomba Eco Village (Desa Berbudaya Lingkungan) Jilid 2 di DAS Citarum Hulu sebanyak 1 Kali di 190 desa, Terlaksananya Gerakan Budaya Raksa Citarum sebanyak 2000 kader ecovillage, dan Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kader Ecovillage Sebanyak 100 Orang selama 4 Hari;
 3. Kegiatan Pengelolaan Jasa Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-, dan target kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pengembangan Jasa Lingkungan Sebanyak 3 Kali dan Tersedianya peta potensi jasa lingkungan sebanyak 1 (satu) Dokumen inventarisasi jasa lingkungan di Jawa Barat;
 4. Kegiatan Pengembangan Eco Village di DAS Ciliwung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-, dan target kegiatan adalah Terlaksananya Riungan dan Pendampingan Desa Berbudaya Lingkungan (Eco Village) di DAS Ciliwung Hulu sebanyak 8 kali riungan dan 5 kali pendampingan di 15 Desa di DAS Ciliwung Hulu, Terlaksananya Koordinasi, Sinergitas, Evaluasi Ecovillage di DAS Ciliwung Hulu sebanyak 1 dokumen, dan Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kader Ecovillage di DAS Ciliwung Hulu Sebanyak 21 orang selama 4 hari.
- d) Sasaran Meningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi hutan dan lahan terdapat dalam PROGRAM PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG dengan Kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Koordinasi RAM-IP Kawasan Lindung, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-, dan target kegiatan adalah Tersedianya database kawasan lindung berbasis Web sebanyak 1 (satu) dokumen database kawasan lindung berbasis Web,

Tersusunnya Draft Peraturan Gubernur Tentang Rencana Induk Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung sebanyak 1 (satu) dokumen draft Peraturan Gubernur, dan Terlaksananya koordinasi pengelolaan kawasan lindung Sebanyak 4 kali.

3.2 Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2016. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Akuntabilitas Keuangan per Sasaran Stratejik 2016

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp.)	Rp.	%
Terkendalnya Beban Pencemaran Air Sungai Utama Dan Udara Perkotaan	Pembinaan Teknis AMDAL di Jawa Barat	400.000.000	399.459.000	99,86
	Penyusunan DED Pusat Keunggulan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	659.200.000	632.194.000	95,90
	Pembinaan dan Koordinasi Produksi Bersih dan Teknologi Lingkungan	250.000.000	250.000.000	100
	METR Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Metropolitan Jawa Barat (3 Metropolitan)	1.744.776.000	1.738.839.000	99,66
	PPP Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pusat Pertumbuhan Jawa Barat (3 pusat Pertumbuhan)	1.200.000.000	1.170.232.000	97,52
	Pembinaan dan Koordinasi KLHS di Jawa Barat	300.000.000	298.844.000	99,61
	Pemantauan Pencemaran Air	2.541.376.000	2.338.435.000	92,01
	Pemantauan Pencemaran Udara	1.329.532.000	1.244.545.088	93,61
	Pemantauan Pencemaran Air Berbasis Masyarakat	810.000.000	697.289.500	86,09

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp.)	Rp.	%
	Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Limbah Industri	272.765.000	254.179.095	93,19
	GCB - Pembinaan Industri Melalui PROPERDA di DAS Citarum	1.979.750.000	1.936.990.418	97,84
	Peningkatan kapasitas SDM pengelola lingkungan	580.000.000	574.165.000	98,99
	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3	300.000.000	292.440.210	97,48
	GCB - Penanganan Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Jawa Barat	2.000.000.000	1.965.578.000	98,28
	Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Jawa Barat	1.500.000.000	1.479.965.250	98,66
	CLTH KKP Pengendalian Pencemaran Kegiatan Pertambangan di Kec. Ciemas	500.000.000	498.390.000	99,68
	Pembinaan Teknis Adiwiyata dan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL)	400.000.000	394.289.000	98,57
	Pembinaan Teknis Program Adipura	1.177.070.000	1.172.238.000	99,59
	GCB - Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan	1.284.200.000	1.276.543.500	99,40
	GCB - Peningkatan Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	800.000.000	796.628.000	99,58
	Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan	400.000.000	394.545.000	98,64
	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Jawa Barat	500.000.000	498.870.000	99,77
	Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Lingkungan Hidup Tahun 2016	280.000.000	276.866.000	98,88
	Implementasi Kantor Berbudaya Lingkungan (Green Building)	322.000.000	303.855.091	94,36

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp.)	Rp.	%
	Publikasi dan Sosialisasi Gerakan Citarum Bestari di Berbagai Media	450.000.000	439.810.206	97,74
	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	9.776.056.000	5.623.938.000	57,53
	Kegiatan Penanggulangan Bencana Lingkungan DAS Citarum	10.328.700.000	10.095.653.600	97,74
Meningkatnya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Pengembangan Model Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Jawa Barat	272.755.000	269.575.000	98,83
	Penyusunan SOP Peringatan Dini Bencana Perubahan Iklim	484.900.000	478.020.000	98,58
	Koordinasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	150.000.000	147.762.500	98,51
	Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim	250.000.000	249.440.900	99,78
Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	225.000.000	197.827.500	87,92
	GCB-Pengembangan Eco Village (Desa berbudaya Lingkungan) di DAS Citarum Hulu	6.943.000.000	6.526.321.589	94,00
	Pengelolaan Jasa Lingkungan	300.000.000	269.390.000	89,80
	Pengembangan Eco Village di DAS Ciliwung	1.000.000.000	992.911.400	99,29
Meningkatnya penyediaan pranata pengelolaan kawasan lindung	Koordinasi RAM-IP Kawasan Lindung	250.000.000	199.111.022	79,64



BAB 4

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat secara periodik dibuat sebagai upaya untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategik organisasi kepada stakeholders. Penjelasan berikut ini merupakan penjelasan beberapa hal penting yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja BPLHD Provinsi Jawa Barat.

4.1 Capaian Kinerja BPLHD Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh rata-rata pencapaian sasaran strategik yaitu 205,55 %, yang dapat diartikan bahwa rata-rata capaian kinerja **sangat baik**. Adapun pencapaian kinerja sasaran strategik tahun 2016 berdasarkan persentase tingkat capaian menunjukkan bahwa dari 4 sasaran strategik dan 6 indikator sasarannya yang ditetapkan semua sasaran dan indikator telah mencapai target capaian kinerja. Dengan demikian seluruh sasaran kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2016 sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang terukur dari nilai persentase tingkat capaian yang mencapai 100% bahkan melampaui.

Sedangkan dalam kaitan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD Provinsi Jawa Barat, BPLHD Provinsi Jawa Barat berupaya melaksanakan program dan kegiatan sesuai target pencapaian IKU. Pada tahun 2016 ini seluruh indikator kinerja utama (IKU) BPLHD Provinsi Jawa Barat diakomodir didalam Perjanjian Kinerja (PK), yang mana seluruh indikator hampir seluruhnya telah mencapai target capaian kinerja, dengan dua indikator diantaranya telah mencapai target dan empat indikator melampaui target. Sehingga berdasarkan hasil pencapaian kinerja pada Bab III, secara umum sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016. Pencapaian seluruh kinerja sasaran telah memenuhi target 100% bahkan diantaranya telah melampaui 100 %.

4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Target seluruh indikator kinerja Badan pengelolaan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dicapai dengan optimal sehingga kendala dan hambatan yang ada dapat diatasi dengan baik. Namun disadari, masih diperlukan beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk mewujudkan

pencapaian sasaran kinerja BPLHD Provinsi Jawa Barat yang semakin meningkat pada tahun 2017 dan selanjutnya, yang mana perlu adanya peningkatan anggaran yang optimal sesuai dengan target-target kegiatan yang diharapkan, selain itu di tahun berikutnya diperlukan peningkatan kemampuan SDM di lingkungan BPLHD Provinsi Jawa Barat dan di institusi lingkungan hidup di Kabupaten/Kota yang merupakan faktor penting dalam tercapainya target capaian, serta adanya kesepahaman tujuan yang sama antara provinsi dan kabupaten kota untuk terlaksanakannya sinergitas dari seluruh stakeholder pengelola lingkungan.

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Penanganan permasalahan lingkungan di Jawa Barat harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu melalui pola koordinasi antar lembaga serta pola kemitraan yang dijalin dengan seluruh *stakeholder* pengelola lingkungan. Selama ini, termasuk dalam kurun waktu tahun 2016, pihak BPLHD Provinsi Jawa Barat tetap berupaya mengembangkan berbagai kegiatan yang dilakukan melalui pola kemitraan bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya, unsur masyarakat, LSM, perguruan tinggi, media masa, dan dunia usaha. Kemudian mengupayakan lebih banyak lagi kegiatan yang ditujukan untuk menggerakkan kesadaran dan peran masyarakat luas baik dalam kaitannya dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, maupun upaya-upaya pemulihan kualitas lingkungan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai stakeholder bersama-sama dengan institusi pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dengan BPLHD Provinsi Jawa Barat yang tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi dari BPLHD itu sendiri. Selain itu dikembangkan kegiatan-kegiatan sebagai antisipasi implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk mengantisipasi hambatan dan kendala yang di hadapi tahun 2016 sehingga akhirnya seluruh indikator kinerja BPLHD Provinsi Jawa Barat dapat dicapai dengan baik, langkah-langkah antisipatif yang diambil adalah mengupayakan mencari sumber dana lain baik dari luar negeri maupun pihak swasta dalam bentuk kerjasama dalam pengelolaan lingkungan di Jawa Barat, membuat terobosan peningkatan kualitas SDM BPLHD Provinsi Jawa Barat maupun institusi lingkungan hidup di Kabupaten/Kota melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi maupun Lembaga-Lembaga Penelitian dan Pelatihan, serta Lembaga Donor International seperti IGES, AOTS, dan lain-lain, meningkatkan jaringan komunikasi dengan berbagai stakeholders termasuk Pemerintah Pusat dan Lembaga lain yang terkait, serta terus berupaya meyakinkan penyamaan persepsi pada segenap stakeholders pengelola lingkungan melalui rapat koordinasi dan forum lingkungan.

Selain langkah antisipatif diatas, terdapat Rencana Tindak Lanjut sebagai upaya perbaikan dalam mengatasi kendala dan hambatan di tahun 2016, adapun Rencana Tindak Lanjut BPLHD Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 4.1. Selain itu dengan adanya penerapan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bentuk organisasi BPLHD yang kewenangannya pada awalnya hanya pada aplikasi pembuatan kebijakan menjadi organisasi yang dapat melaksanakan kegiatan yang merupakan implementasi dari kebijakan

yang telah disusun, serta dimasukkannya sub urusan persampahan pada urusan lingkungan hidup serta ditambahkan dua UPTD (Balai Pengelolaan Sampah Regional dan Balai Laboratorium Lingkungan Hidup) menjadi kesatuan yang dapat memperkaya dan mendukung upaya perbaikan dalam mengatasi kendala dan hambatan di tahun 2016, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut BPLHD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
1	Terkendalinya beban pencemaran air sungai utama	Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang	0	0	0	46,48	Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat	Jumlah Dokumen lingkungan yang dinilai oleh KPA (Komisi Penilaian AMDAL) Provinsi Jawa Barat	15 Dokumen	Jumlah Dokumen Lingkungan yang menjadi bahan pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan/usaha	249.451.600	BPLHD
							Pembinaan Teknis Pelaksanaan Penatalaksanaan Dokumen Lingkungan	Jumlah Komisi Penilai AMDAL yang mengikuti pembinaan teknis	48 orang	Jumlah Komisi penilai AMDAL yang memahami penatalaksanaan dokumen lingkungan	137.350.000	BPLHD
							Kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Implementasi Izin Lingkungan (Tahap Pra hingga Konstruksi)	Jumlah kegiatan yang dipantau dan diawasi oleh KPA Provinsi Jawa Barat	15 kegiatan/ usaha	Jumlah kegiatan/usaha yang mengimplementasikan ketentuan dalam izin lingkungan	231.800.000	BPLHD
							Penyusunan KLHS Untuk Perubahan Perda RTRW Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010	Jumlah Dokumen KLHS Untuk Perubahan Perda RTRW Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 yang Disusun	1 (satu) Dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Sebagai Bahan Pertimbangan Teknis yang Diperlukan Dalam Penyusunan Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat	593.075.000	BPLHD
							Penyusunan KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau Pulau Kecil yang Disusun	1 (satu) Dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan yang Menjadi Pertimbangan Teknis Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	642.250.000	BPLHD
							CLTH-Penyusunan Kajian Daya Dukung Ciletuh Kabupaten Sukabumi	JumlahDokumen Kajian Daya Dukung Ciletuh Kabupaten Sukabumi yang Disusun	1 (satu) Dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan yang Menjadi Bahan Pertimbangan Teknis Perencanaan Pengembangan Ciletuh	349.124.000	BPLHD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
							Pembinaan Teknis Penyusunan dan Penjaminan Kualitas KLHS	Jumlah Aparatur Kabupaten / Kota yang Mengikuti Pembinaan Teknis Penyusunan dan Penjaminan Kualitas KLHS	50 Orang	Jumlah Aparatur Kabupaten / Kota yang Memahami Teknis Penyusunan dan Penjaminan Kualitas KLHS	293.896.000	BPLHD
							Pemantauan Kualitas Air Sungai di Jawa Barat	Jumlah badan air (sungai dan waduk) yang dipantau kualitasnya	8 badan air	Jumlah badan air di Jawa Barat yang terinformasikan data kualitasnya	868.591.000	BPLHD
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PPSP Jawa Barat	Jumlah kabupaten/kota lokasi PPSP yang terpantau dan terevaluasi	27 kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang terinformasikan keefektifannya dalam melaksanakan program PPSP sebagai dasar perencanaan selanjutnya	117.820.000	BPLHD
							Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi PPSP Jawa Barat	Jumlah dokumen pergub yang disusun:	1 dokumen	Jumlah dokumen pergub yang digunakan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi PPSP di Jabar	192.000.000	BPLHD
							Pemantauan/Patroli Sungai Berbasis Masyarakat	Jumlah segmen di DAS Citarum Hulu yang terpantau oleh patroli masyarakat	4 segmen	Jumlah segmen di DAS Citarum Hulu yang tidak dicemari oleh masyarakat/pelaku usaha	632.077.600	BPLHD
							GCB - PROPERDA (Program Penilaian Kinerja Perusahaan di Daerah)	Jumlah industri yang mengikuti pembinaan teknis PROPERDA	225 industri	Jumlah industri yang menerapkan kinerja pengelolaan lingkungan dalam usaha/kegiatannya	1.657.844.150	BPLHD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
							Pengendalian Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah industri yang mengikuti pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3	75 Industri	Jumlah industri yang mengimplementasikan pengelolaan B3 dan Limbah B3 dalam usaha/Kegiatannya	245.000.000	BPLHD
							Pengembangan Generasi Lingkungan	Jumlah program pengembangan generasi lingkungan yang dilaksanakan	4 program	Jumlah program pengembangan generasi lingkungan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	1.079.033.400	BPLHD
							Peningkatan SDM Pengelola Kawasan dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah aparatur kecamatan yang mengikuti pembinaan teknis pengelola kawasan dalam pengelolaan sampah terpadu di hulu das citarum	40 orang	Jumlah aparatur kecamatan yang memahami dan dapat membina masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu di DAS Citarum	231.380.000	BPLHD
							Penyadaran Lingkungan Bagi Multipihak di DAS Citarum	Jumlah kegiatan seremonial yang dilaksanakan	3 kegiatan	Jumlah kegiatan seremonial yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	900.247.000	BPLHD
							Penegakan Hukum Lingkungan Secara Administratif	Jumlah industri pelaku pencemaran yang ditindaklanjuti secara administratif	45 industri	Bertambahnya jumlah industri yang menaati hukum lingkungan	971.985.000	BPLHD
							Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	Jumlah kasus pidana lingkungan yang ditindaklanjuti/diproses	2 Kasus	Jumlah kasus pidana lingkungan yang dapat diselesaikan dalam rangka pengendalian pencemaran	957.952.500	BPLHD
							Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2017	Jumlah dokumen SLHD yang disusun	1 dokumen	Jumlah dokumen yang mendukung ketersediaan data dan informasi pengelolaan lingkungan di	284.650.000	BPLHD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
									Jawa Barat			
							Penyusunan Annual State Environment Report (ASER) Tahun 2016	Jumlah dokumen ASER yang disusun	1 dokumen	Jumlah dokumen yang mendukung ketersediaan data dan informasi pengelolaan lingkungan	150.000.000	BPLHD
							Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan	Tersedianya Portal Informasi Lingkungan yang dikembangkan	1 Portal	Tersedianya Portal informasi lingkungan yang mendukung ketersediaan data dan informasi sebagai bahan pertimbangan teknis perencanaan Bidang Lingkungan Hidup	283.600.000	BPLHD
							Penyusunan Majalah Warta Lingkungan	Tercetaknya warta lingkungan hidup Jawa Barat	200 Eksemplar	Tersedianya jumlah eksemplar warta lingkungan yang terdistribusi ke OPD Provinsi dan Kab/Kota dalam mendukung ketersediaan data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Barat	104,400,000	BPLHD
							Penyusunan dan Pelaporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat	Tersedianya dokumen IKLH Provinsi Jawa Barat	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Provinsi Jawa Barat yang menjadi bahan pertimbangan teknis perencanaan pengelolaan lingkungan di Jawa Barat	484.955.000	BPLHD
							Pelaksanaan Kantor Berbudaya Lingkungan	Pelaksanaan Penilaian Kantor Berbudaya Lingkungan	1 Kegiatan	- Menciptakan lingkungan perkantoran di Jawa Barat yang bersih, indah dan nyaman serta menyehatkan dengan jalan pengendalian	236.500.000	BPLHD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
									penggunaan sumber daya dan pencemaran.- Meningkatkan efektifitas efisiensi dengan jalan menghindari pemborosan biaya dan pemakaian air, bahan bakar dan listrik.			
							Pengembangan Ecovillage di DAS Ciliwung	Desa yang mengikuti pendampingan teknis (riungan dan pendampingan) gerakan eco village dalam rangka gerakan citarum bestari	30 desa	Adanya gerakan desa berbudaya lingkungan di DAS Hulu Ciliwung	976.037.500	BPLHD
							GCB-Gerakan Budaya Ecovillage di DAS Citarum	Desa yang mlakukan kegiatan berbudaya lingkungan untuk mewujudkan Citarum Bestari	165 desa	Meningkatnya upaya/kegiatan/gerakan untuk mewujudkan desa berbudaya lingkungan (eco village)	6.792.767.500	BPLHD
							Rapat Koordinasi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup se- Jawa Barat	Jumlah PPLH se Provinsi Jawa Barat yang mengikuti rakor	50 orang PPLH se Jawa Barat bersinergi dalam pengawasan lingkungan hidup	Jumlah PPLH yang bersinergi dalam pengawasan lingkungan hidup	25.000.000	BPLHD
							Pengawasan Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/Atau Kegiatan Ijin	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diawasi ketaatan terhadap ijin lingkungan yang diawasi oleh PPLH Provinsi Jawa Barat	50 pelaku usaha/kegiatan yang diawasi oleh PPLH Provinsi Jawa Barat	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan	258.750.000	BPLHD
							Pilot Project Pengembangan Pengolahan Sampah Terpadu TPST	Jumlah alat pengolah sampah terpadu TPST 3R meliputi komposter, mesin pemilah pengayak sampah, mesin pencacah	1 paket	Jumlah alat pengolah sampah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pilot	300.000.000	BPLHD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
							sampah					
							Pengembangan Ecovillage di DAS CiManuk-Citanduy	Desa mengembangkan kegiatan berbudaya lingkungan	erakan desa berbudaya klingkungan 27 desa	Berkembangnya desa berbudaya lingkungan di DAS Ciliwung	1.754.527.050	BPLHD
							Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Daya Dukung Daya Tampung	Jumlah dokumen pergub tentang daya dukung daya tampung kawasan bandung utara (KBU)	1 dokumen	Jumlah dokumen pergub tentang daya dukung daya tampung kawasan bandung utara (KBU) sebagai acuan teknis	235.200.000	BPLHD
							Sosialisasi Hukum Lingkungan	Jumlah aparatur pemerintah provinsi dan kab/kota yang mengikuti sosialisasi	80 orang	Jumlah alaratur pemerintah provinsi dan kab/kota yang memahami dan mengimplementasikan hukum lingkungan	90.000.000	BPLHD
							Penyempurnaan Materi Teknis RPPLH Provinsi Jawa Barat dan Penyusunan RPPLH Jawa Barat	Jumlah Dokumen Teknis RPPLH Provinsi Jawa Barat Terdiri Dari Materi Teknis dan Raperda RPPLH yang Disusun	2 (dua) Dokumen	Jumlah Dokumen Teknis yang Menjadi Pertimbangan / Acuan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jawa Barat	300.000.000	BPLHD
							Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Alternative Dispute	Jumlah sengketa lingkungan yang ditindaklanjuti secara ADR	2 kasus	Jumlah sengketa lingkungan yang diselesaikan secara ADR dalam rangka pengendalian pencemaran	243.300.000	BPLHD
							GCB - FS Penurunan Beban Pencemaran di Sektor UMKM	Jumlah Dokumen FS yang di Susun	1 Dokumen	Tersusunnya Kajian Jumlah Dokumen FS yang Menjadi Bahan Pertimbangan Teknis Dalam Perencanaan Penurunan Beban Pencemaran di Sekitar UMKM	200.000.000	BPLHD
							Kehumasan dan dokumentasi	Jumlah kegiatan sosialisasi & kampanye yang di dokumentasikan di provinsi untuk	kali	- Jumlah kegiatan kampanye masyarakat terkait pengelolaan lingkungan - Aparatur Provinsi,	45.000.000	BPLHD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
								menghasilkan lokasi		Kab/Kota masyarakat pelaku usaha		
							Training Untuk Pengelolaan Kualitas Sungai	Jumlah aparat yang mengikuti training untuk pengelolaan kualitas sungai	1 orang	Jumlah aparat yang memahami pengelolaan sungai dengan metode Serious Gaming For Healty River dan dapat melatih aparat lainnya di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian pencemaran sungai di Jawa Barat	40.000.000	BPLHD
							Pendukung Operasional SAMSAT Penanganan DAS Citarum	Terwujudnya koordinasi Tim SAMSAT PENANGANAN DAS CITARUM	24 kali koordinasi	Terciptanya koordinasi yang intensif antar OPD terkait DAS Citarum	615.420.000	BPLHD
		Indeks Kualitas Udara			63	Pemantauan Kualitas Udara di Jawa Barat	Jumlah Lokasi yang Terpantau Kualitas Udara Ambien	8 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang Terinformasikan Kualitas Udara Ambien sebagai Bahan Pertimbangan Teknis Pengendalian Pencemaran Udara	490.650.500	BPLHD	
2	Meningkatnya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah lokasi Program kampung Iklim (PROKLIM)					Penatalaksanaan Kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Pembinaan Teknis	108 orang	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memahami adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	220.187.500	BPLHD
		Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor limbah										
3	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)					Pengembangan Taman Kehati di Kiara Payung Sumedang Jawa Barat	Jumlah taman kehati yang dikembangkan	1 Taman Kehati	Jumlah taman kehati yang meningkat fasilitasnya dalam mendukung capaian kawasan lindung	571,253,500	BPLHD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
	Meningkatnya penyediaan pranata pengelolaan kawasan lindung	Jumlah pedoman pengelolaan kawasan lindung dan non lindung dalam pelaksanaan pembangunan					Penyusunan KLHS Untuk Perubahan Perda RTRW Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010	Jumlah Dokumen KLHS Untuk Perubahan Perda RTRW Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 yang Disusun	1 (satu) Dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Sebagai Bahan Pertimbangan Teknis yang Diperlukan Dalam Penyusunan Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat	593.075.000	BPLHD

Tabel 4.2
Tambahan Rencana Tindak Lanjut Sub urusan Persampahan BPLHD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
(Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
1	Meningkatnya pelayanan bidang lingkungan hidup	Meningkatnya pelayanan pengujian air, udara, dan tanah					Pelayanan Uji Mutu di Balai Laboratorium Lingkungan Hidup	Tersedianya tenaga honorer Non PNS BPMKL Diskimrum	351 OB	Meningkatnya produktivitas BPMKL Diskimrum	1.233.861.100	BPLHD
							Penyusunan DED Revitalisasi Gedung Balai Laboratorium Lingkungan Hidup (Eks Gedung BPMKL)	Tersusunnya DED pembangunan gedung kantor BPMKL	1 kegiatan	Terselenggaranya pembangunan gedung kantor BPMKL di tahun 2018	855.948.000	BPLHD
		Terselenggaranya pengelolaan sampah regional di Jawa Barat					Pengadaan jasa kebersihan (luar dan dalam) Kantor TPK Sarimukti	Kebersihan Kantor TPK Sarimukti	1 TPK	Meningkatnya kebersihan TPK Sarimukti	740.200.000	BPLHD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
							Pengadaan jasa Keamanan TPK Sarimukti	Keamanan Kantor TPK Sarimukti	1 TPK	Meningkatnya keamanan TPK Sarimukti	560.200.000	BPLHD
							Pengadaan makanan penambah daya tahan tubuh pengelola TPK Sarimukti	Makanan penambah daya tahan tubuh pengelola TPK Sarimukti	21.600 OH	Meningkatnya produktivitas SDM pengelola TPK Sarimukti	432.600.000	BPLHD
							Pengadaan pakaian kerja lapangan dan alat pelindung diri Pengelolaan	Pakaian kerja lapangan	60 orang	Meningkatnya produktivitas SDM pengelola TPK Sarimukti	59.500.000	BPLHD
							Pembangunan jalan di TPK Sarimukti (lanjutan)	Jalan di TPK Sarimukti	350 m	Meningkatnya akses pengangkutan sampah ke TPK Sarimukti	1.097.142.000	BPLHD
							Normalisasi saluran drainasedi TPK Sarimukti (lanjutan)	Normalisasi saluran drainase	450 m	Menurunnya jumlah/luasan genangan air di kawasan TPK Sarimukti	864.750.000	BPLHD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
							Perbaikan Jalan Akses TPA Sarimukti Rp. 15 M (3 KM)	Jalan Akses TPK Sarimukti	1,5 Km	Meningkatnya produktivitas pengelolaan sampah di TPA Sarimukti	8.200.000.000	BPLHD
							Perluasan TPK Sarimukti	Bangunan cell landfill, IPAL, 4 unit alat berat dan pembayaran ke Perhutani (25 ha)	20 Ha	Meningkatnya produktivitas pengelolaan sampah di TPA Sarimukti	38.326.980.000	BPLHD
							Pengelolaan TPK Sarimukti	Dokumen Pengelolaan kegiatan TPK Sarimukti	1 Tahun	Meningkatnya produktivitas pengelolaan sampah di TPA Sarimukti	3.889.340.000	BPLHD
							Penyediaan bahan bakar/minyak dan gas untuk alat berat, kendaraan dan mesin dalam Pengelolaan TPK Sarimukti	Penyediaan bahan bakar/minyak dan gas	1 Tahun	Meningkatnya produktivitas pengelolaan sampah di TPA Sarimukti	7.411.800.000	BPLHD
							Pengadaan jasa kebersihan kantor TPPAS Regional Legok Nangka	Pemeliharaan Kebersihan Kantor TPPAS Legok Nangka	1 tahun	Meningkatnya pengelolaan TPPAS Legok Nangka dalam rangka peningkatan layanan persampahan pada Tahun 2018	99.850.000	BPLHD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
							Pengadaan jasa kebersihan luar kantor TPPAS Regional Legok Nangka	Pemeliharaan kebersihan Luar Kantor TPPAS Legok Nangka	1 Tahun	Meningkatnya pengelolaan TPPAS Legok Nangka dalam rangka peningkatan layanan persampahan pada Tahun 2018	180.000.000	BPLHD
							Pengadaan jasa keamanan TPPAS Regional Legok Nangka	Pemeliharaan keamanan TPPAS Legok Nangka	1 Tahun	Meningkatnya pengelolaan TPPAS Legok Nangka dalam rangka peningkatan layanan persampahan pada Tahun 2018	360.000.000	BPLHD
							Pengadaan jasa konsultasi pendampingan lelang investasi TPPAS Regional Legok Nangka	Dokumen lelang investasi TPPAS Regional Legok Nangka	1 Dokumen	Meningkatnya pengelolaan TPPAS Legok Nangka dalam rangka peningkatan layanan persampahan pada Tahun 2018	1.633.500.000	BPLHD
							Pengadaan jasa kebersihan TPPAS Regional Nambo	Pemeliharaan kebersihan TPPAS Regional Nambo	1 Tahun	Meningkatnya pengelolaan TPPAS Legok Nangka dalam rangka peningkatan layanan persampahan pada Tahun 2018	115.000.000	BPLHD
							Pengadaan jasa Keamanan TPPAS Regional Nambo	Pemeliharaan keamanan TPPAS Regional Nambo	1 Tahun	Meningkatnya pengelolaan TPPAS Legok Nangka dalam rangka peningkatan layanan persampahan pada Tahun 2018	210.000.000	BPLHD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
							Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan di TPPAS Regional	Lampu penerangan jalan di TPPAS Regional Nambo	1 kegiatan	Meningkatnya pengelolaan TPPAS Legok Nangka dalam rangka peningkatan layanan persampahan pada Tahun 2018	200.000.000	BPLHD
							Pembangunan lanjutan jembatan timbang TPPAS Regional Nambo	Jembatan timbang di TPPAS Regional Nambo	1 Kegiatan	Meningkatnya pengelolaan TPPAS Legok Nangka dalam rangka peningkatan layanan persampahan pada Tahun 2018	1.099.250.000	BPLHD
							Pengadaan jasa kebersihan TPA Leuwigajah	Kebersihan TPA Leuwigajah	1 Tahun	Meningkatnya pengelolaan TPA Leuwigajah	55.000.000	BPLHD
							Pengadaan jasa keamanan TPA Leuwigajah	Keamanan TPA Leuwigajah	1 Tahun	Meningkatnya pengelolaan TPA Leuwigajah	175.000.000	BPLHD
							Pembayaran kompensasi lahan Perhutani untuk TPPAS Ciayumajakuning	Dokumen pembayaran kompensasi lahan perhutani untuk lokasi TPPAS Regional Ciayumajakuning	1 kegiatan	Meningkatnya pengembangan pelayanan persampahan secara regional untuk wilayah Ciayumajakuning	2.153.340.000	BPLHD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
							Pengadaan Alat Berat Bulldozer	Bulldozer	2 unit	Meningkatnya pengelolaan sampah di TPK Sarimukti	8.102.850.000	BPLHD
							Pengadaan Alat Berat Excavator	Excavator	2 unit	Meningkatnya pengelolaan sampah di TPK Sarimukti	4.095.952.500	BPLHD
							Pembayaran lahan perhutani di TPK Sarimukti	Perluasan TPK Sarimukti	1 paket	Meningkatnya pengelolaan sampah di TPK Sarimukti	4.586.300.000	BPLHD
							Studi penetapan lokasi TPPAS Regional Bekarpur	Dokumen studi penetapan lokasi TPPAS Regional Bekarpur	1 Dokumen	Meningkatnya pengembangan pelayanan persampahan secara regional untuk wilayah Bekarpur	994.800.000	BPLHD
							Studi Kelayakan investasi dan teknologi pengelolaan TPPAS Regional	Dokumen Studi Kelayakan Investasi dan Teknologi Pengelolaan TPPAS Regional Ciayumajakuning	1 Dokumen	Meningkatnya pengembangan pelayanan persampahan secara regional untuk wilayah Ciayumajakuning	904.000.000	BPLHD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Kinerja sasaran				PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
							Kajian Lingkungan TPPAS Regional Bekarpur	Dokumen Kajian Lingkungan TPPAS Regional Bebek Karpur	1 Dokumen	Meningkatnya pengembangan pelayanan persampahan secara regional untuk wilayah Bekarpur	639.800.000	BPLHD